

DAFTAR BACAAN

A. BUKU

Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. *Perpajakan Indonesia (Konsep, Aplikasi, & Penuntun Paraktis)*. C.V Andi Offset (Penerbit Andi). Yogyakarta. 2009.

Adrian Sutedi. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika. Jakarta. 2007.

_____. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.

Angger Sigit Pramukti. Fuady Primaharsya. *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia. 2015.

Daeng Naja. *Teknik Pembuatan Akta*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia. 2012.

Edy Suprianto. *Hukum Pajak Indonesia*. Garaha Ilmu. Yogyakarta. 2014.

Effendi Perangin-Angin. *Praktek Jual Beli Tanah*. Rajawali Pers. Jakarta. 1987.

_____. *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Rajawali Press. Jakarta. 2007.

Fauzi Malik. *Penerapan PPh Final Dalam Sistem Self Assesment Ditinjau Dari Asas Keadilan*. Berita Pajak. Nomor 1506. 2004.

Husni Thamrin. *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*. Yogyakarta. Laksbang Presindo. 2011.

Irawan Soeredjo. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Arloka. Surabaya. 2003.

Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta. Penerbit Andi Publisher. 2013.

Marihot Pahala Siahaan. *Pajak Daerah dan retribusi daerah*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010.

Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010.

Muhammad Djafar Sidi. *Hukum Acara Peradilan Pajak*. Rajawali Pers. Jakarta. 2013

Marihot Pahala Siahaan. *Utang Pajak Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Rajawali Pers. Jakarta. 2004.

_____. *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Teori dan Praktik*. Jakarta. PT. Raja Grafindo. 2005.

_____. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2010.

_____. *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sebagai Pajak Daerah*. Jakarta. Sagung Seto. 2011.

_____. *Pajak Daerah & Retribusi daerah*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada. 2013.

Muqodim. *Perpajakan Buku Satu (Edisi Dua/Revisi)*. UII dan Ekonisia. Yogyakarta 1999.

Nieuwenhuis. *Hoofdstuken Verbintenissenrecht*. terjemahan Djasadin Saragin. Surabaya. 1985.

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media. Jakarta. 2008.

_____. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. 2010.

Philipus M. Hadjon dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. cet. ke-X*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2008.

Qirom Syamsudin Meliala. *Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Liberty. Jogjakarta. 1985.

R. Subekti. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1979.

R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum cet. ke-8*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006.

Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. *Perpajakan (Teori dan Teknis Perhitungsn)*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2010.

Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum*. Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 2003.

- Ridwan H R. *Hukum Administrasi Negara*. PT. RajaGrafindo. Jakarta. 2006.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006.
- _____ *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- _____ *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2016.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Ketujuh. Liberty. Yogyakarta. 2006.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. PT Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta.
- Teguh Samudra. *Hukum pembuktian Dalam Acara Perdata*. Alumni. Bandung. 1992.
- Urip Santoso. *Pejabat Pembuat Akta Tanah Prespektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta*. Kencana. Jakarta. 2017.
- Wirawan B Lilyas dan Rudy Suhartono. *Hukum Pajak Material 1*. Jakarta. Salemba Humanika. 2011.
- Y. Sri Pudyatmoko. *Pengantar Hukum Pajak*. Andi. Yogyakarta. 2009.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.

B. TESIS

- Fatimah Zakiyya. *Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Keterlambatan Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan Di kantor Pertanahan (Analisis Putusan Mahkamah Agung nomor: 1563 K/PDT/2010)*. Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama. 2018.
- Karina Pramythasari. *Keberadaan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Di Wilayah Kabupaten Karanganyar*. Tesis. Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Jakarta. 2011

- Mohammad Iqbal Dahnan. *Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan*. Tesis. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember. 2018
- Purna Noor Aditama. *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli*. Tesis. Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2017
- Priska Khoeway. *Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Kesalahan Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Yang Telah Didaftarkan*. Tesis Program Pascasarjana. Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya. 2012
- Rusdianto S. *Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. 2016.
- Sigit Dwi Santoso. *Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuak Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 k/pdt/2013)*. Tesis. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama. 2018

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblaad nomor 23 tahun 1847
- Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
- Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 Tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/ atau Bangunan Beserta Perubahannya

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta

D. INTERNET

Dikutip Dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/dorong-peran-ppat-pastikan-pph-final-disetor>. Diakses pada tanggal 11 November 2019. Pukul 00.45 WIB

Dikutip Dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akta>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2020. Pukul 02.45 WIB

Dikutip Dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sanksi>. Diakses Pada Tanggal 7 Februari 2020. Pukul 24.30 WIB

Dikutip Dari <https://www.pajak.go.id/artikel/jual-beli-tanah-dibawah-rp60-juta-free-pph-asal>. Diakses Pada Tanggal 1 Januari 2020. Pukul 23.44 WIB

E. MAJALAH

Boedi Harsono. *PPAT Sejarah dan Kewenangannya*. Majalah Renvoi Nomor 844 iv. Januari. 2007.

Jimly Asshiddiqie. *Indenpensi dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Media Notariat Edisi April-Juni 2003.

